

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA
BUDAYA BERKELANJUTAN DI KAMPUNG WAE REBO**

Arifa Restu Citrahayi¹, Shabbrinna Syifa Annisa², Aura Meiza Dwi Putri³, Bilqis

Ulya Hanifah⁴, Prisca Kiki Wulandari⁵

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Brawijaya

Email: arifacitrahayi@student.ub.ac.id

Abstrak

Pariwisata budaya memiliki peran strategis dalam memperkuat identitas kolektif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama ketika nilai budaya tidak hanya diposisikan sebagai komoditas visual, tetapi dijadikan landasan utama dalam pengelolaan destinasi. Kampung Wae Rebo sebagai desa adat yang memperoleh pengakuan internasional masih menghadapi tantangan signifikan, seperti keterbatasan sarana-prasarana, aksesibilitas yang terbatas, serta rendahnya literasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana mekanisme *Collaborative Governance* milik Ansell dan Gash dapat menjadi kerangka yang efektif untuk merumuskan strategi pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan, dengan menekankan keterkaitan antara pembangunan infrastruktur dan penguatan kapasitas sosial masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur melalui penelaahan jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel akademik, dan dokumen kebijakan yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan *content analysis* berbasis pendekatan tematik guna mengidentifikasi dinamika sosial, pola kolaborasi, serta arah kebijakan yang berkembang di Wae Rebo. Artikel ini menyimpulkan bahwa

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 237

DOI : Prefix DOI : [10.8734/panorama.v1i1.1395](https://doi.org/10.8734/panorama.v1i1.1395)

Copyright : Author

Publish by :

Panorama



This work is licensed

under a [Creative](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

pengembangan pariwisata Wae Rebo menuntut integrasi antara pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, dengan menempatkan *Collaborative Governance* sebagai kerangka tata kelola utama yang memungkinkan harmonisasi antara pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan jangka panjang.

Kata kunci: *Collaborative Governance*, Pariwisata budaya, Pembangunan infrastruktur, Edukasi masyarakat, Keberlanjutan.

Latar belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Indonesia, dengan kekayaan budaya yang begitu beragam, memiliki peluang besar untuk mengembangkan perekonomian melalui pariwisata di bidang kebudayaan. Salah satu daerah yang dijadikan objek wisata budaya adalah Kampung Wae Rebo. Wae Rebo merupakan sebuah kampung adat yang pernah dinobatkan sebagai Warisan Budaya Dunia pada Agustus 2012 oleh UNESCO *Asia-Pacific Awards for Heritage Conservation*. Selain itu, pada tahun 2018, Kampung Wae Rebo juga mendapatkan penghargaan dalam kategori budaya oleh *Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA)* serta dinobatkan sebagai salah satu kota kecil terindah di dunia oleh majalah *Time Out* pada tahun 2024. Sejak saat itu, Wae Rebo semakin populer dan menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun dunia. Wae Rebo dikenal dengan sebutan “kampung di atas awan” karena letaknya berada di ketinggian lebih dari 1.111 mdpl dan dikelilingi panorama pegunungan yang indah. Daya tarik utamanya terletak pada keunikan desain arsitektur rumah adatnya bernama Mbaru Niang yang menjadi simbol perlindungan dan persatuan masyarakatnya (Rabbani et al., 2021). Selain itu, Kampung Wae Rebo juga masih mempertahankan budaya serta kearifan lokalnya, seperti Tarian Caci yang sarat akan makna dan Upacara Penti yang dilakukan sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan (Lanur dan Martini, 2015).

Meskipun telah diakui secara internasional, pengembangan pariwisata budaya di Wae Rebo masih menghadapi sejumlah tantangan fundamental. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah terkait keterbatasan sarana dan prasarana. Akses jalan yang kurang memadai, belum terjangkaunya jaringan listrik, minimnya fasilitas penginapan dan kamar mandi, serta jaringan komunikasi yang sulit menjadi hambatan utama bagi wisatawan (Sangkak dan Ikmal, 2022). Selain kendala infrastruktur, Wae Rebo juga menghadapi permasalahan terkait kurangnya edukasi masyarakat mengenai pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Selain sarana dan prasarana, destinasi wisata yang memanfaatkan potensi budaya serta tradisi masyarakat lokal juga perlu didukung oleh edukasi mengenai pelestarian budaya, pengelolaan lingkungan, dan pariwisata berkelanjutan (Ratna, 2025).

Sejauh ini, penelitian-penelitian sebelumnya terkait Wae Rebo banyak berfokus pada strategi umum pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal dan analisis potensi budaya sebagai daya tarik utama. Namun, kajian yang secara mendalam menganalisis bagaimana kolaborasi antar *stakeholders* dalam membentuk strategi pengembangan pariwisata, khususnya yang berkaitan dengan masalah infrastruktur dan edukasi masyarakat, masih sangat terbatas jumlahnya.

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata budaya berkelanjutan sangat bergantung pada kerja sama antar aktor dan kemampuan mereka dalam membangun visi bersama, yaitu mengembangkan desa wisata Wae Rebo dengan mempertahankan nilai budaya sembari meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kampung Wae Rebo dipilih sebagai objek penelitian karena statusnya sebagai salah satu kampung adat yang dikenal dunia masih mempertahankan kearifan lokal dan kental akan nilai-nilai kebudayaan, namun terhambat oleh masalah sarana-prasarana dan edukasi masyarakatnya. Wae Rebo menjadi studi kasus yang ideal untuk menguji bagaimana mekanisme *collaborative governance* dapat berperan dalam mengembangkan pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian budaya. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis mekanisme *collaborative governance*

milik Ansell dan Gash sebagai dasar analisis dalam membentuk strategi pengembangan pariwisata budaya berkelanjutan yang berfokus pada pengembangan sarana-prasarana dan edukasi masyarakat lokal, sehingga dapat mendukung pelestarian budaya yang berkelanjutan, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.

Kajian Literatur

Teori *Collaborative Governance* merupakan pendekatan tata kelola publik yang menekankan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Ansell dan Gash menjelaskan bahwa kolaborasi yang efektif hanya dapat terjadi bila ada kepercayaan, komitmen bersama, serta komunikasi terbuka di antara para pihak (Ansell & Gash, 2008 dalam Arma, 2023). Dalam model ini, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh desain kelembagaan yang inklusif, kepemimpinan fasilitatif, dan mekanisme dialog yang berkesinambungan. Teori ini kemudian banyak diadaptasi dalam konteks pembangunan daerah, termasuk pengelolaan pariwisata berkelanjutan, karena mampu menyatukan berbagai kepentingan menjadi satu visi bersama untuk mencapai kesejahteraan sosial dan pelestarian budaya (Ansell & Gash, 2008 dalam Arma, 2023)

Penelitian oleh Nur Ambia Arma (2023) melalui artikel "*The Collaborative Governance dalam Pengembangan Smart Village Desa Pangandaran*" menunjukkan bagaimana kolaborasi lintas sektor berperan penting dalam membangun *smart village* yang berkelanjutan. Pemerintah desa, masyarakat, PT Telkom Indonesia, serta media massa terlibat aktif dalam menciptakan sinergi menuju tata kelola digital desa yang efektif. Namun, penelitian tersebut juga menyoroti masih lemahnya dimensi *penta-helix*, karena unsur akademisi belum dilibatkan secara optimal dalam riset, pendampingan, maupun evaluasi kebijakan. Ketidadaan peran akademik menyebabkan keterbatasan inovasi dan pengetahuan berbasis data dalam implementasi program (Arma, 2023) Sementara itu, artikel mengenai "*Collaborative*

Governance dalam Pengembangan Wisata Budaya Keraton Kacirebonan” memperlihatkan bagaimana kolaborasi pemerintah daerah, Bank Indonesia, Pokdarwis, dan masyarakat mampu memperkuat pengelolaan wisata budaya melalui promosi, pembinaan, serta peningkatan infrastruktur (Raharjo, 2022). Kolaborasi ini berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperluas manfaat ekonomi lokal. Namun, penelitian tersebut juga menemukan kendala berupa lemahnya koordinasi antar lembaga, ketiadaan regulasi formal, serta ketergantungan pada dukungan eksternal yang membuat program kolaborasi sulit berkelanjutan (Raharjo, 2022). Dalam konteks Kampung Wae Rebo, pendekatan ini relevan untuk melihat bagaimana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pelaku wisata dapat memperkuat pengembangan sarana-prasarana dan edukasi masyarakat tanpa mengabaikan keaslian budaya serta prinsip keberlanjutan lingkungan. Dapat dilihat bahwa teori *Collaborative Governance* memiliki keunggulan dalam kemampuannya menyatukan berbagai aktor dan sumber daya secara integratif, peningkatan legitimasi sosial dan rasa memiliki masyarakat terhadap pengelolaan destinasi dan fleksibilitasnya dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal. Namun, teori ini juga memiliki keterbatasan, antara lain ketergantungan pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, potensi ketimpangan kekuasaan antar aktor, serta lemahnya mekanisme pengawasan jika tidak ada desain kelembagaan yang kuat.

Collaborative Governance dipilih sebagai pisau analisis utama dalam penelitian “*Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya Berkelanjutan Di Kampung Wae Rebo*” karena paling relevan untuk memahami dinamika pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kampung Wae Rebo. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, pelaku pariwisata, dan lembaga pendukung lainnya dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan program pembangunan. Dalam konteks wisata budaya Wae Rebo, keberhasilan pengembangan sarana-prasarana dan edukasi

masyarakat sangat bergantung pada koordinasi lintas aktor, mengingat wilayah ini memiliki struktur sosial tradisional yang kuat dan kondisi geografis yang menantang.

Collaborative Governance menjadi landasan analisis yang tepat karena mampu menjembatani kepentingan antara pelestarian budaya lokal dan kebutuhan pembangunan modern. Melalui pendekatan ini, proses pembangunan tidak hanya berorientasi pada peningkatan fasilitas wisata, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan partisipasi aktif dalam tata kelola pariwisata. Kolaborasi yang baik di antara para pemangku kepentingan akan mendorong terciptanya kesepahaman bersama, sehingga setiap kebijakan atau program yang dijalankan selaras dengan nilai-nilai budaya masyarakat Wae Rebo dan prinsip keberlanjutan lingkungan. Selain itu, teori ini relevan karena memberikan kerangka analisis untuk menilai sejauh mana peran dan kontribusi masing-masing aktor berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan pembangunan wisata. Melalui perspektif *Collaborative Governance*, penelitian ini dapat mengidentifikasi potensi hambatan seperti ketimpangan kekuasaan, lemahnya koordinasi, atau keterbatasan kapasitas lembaga lokal, sekaligus menawarkan strategi sinergi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, teori ini sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengkaji strategi pengembangan sarana-prasarana dan edukasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pariwisata berkelanjutan di Kampung Wae Rebo, guna mendukung pelestarian budaya yang berkelanjutan dan inklusif serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus berbasis literatur dengan metode kualitatif, yang dipilih guna menghasilkan analisis mendalam mengenai dinamika pariwisata budaya di Kampung Wae Rebo meskipun tanpa observasi langsung di lapangan. Melalui studi kasus literatur, peneliti berupaya memahami konteks sosial dan budaya masyarakat serta menganalisis berbagai kebijakan yang memengaruhi pengelolaan dan pelestarian Wae Rebo sebagai destinasi wisata

budaya. Data yang peneliti gunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah dan dokumen resmi. Artikel akademik, laporan penelitian, jurnal internasional dan nasional, portal berita online, dan dokumen pemerintah daerah tentang masalah pariwisata dan kebudayaan adalah sumber data. Dengan menggunakan kata kunci seperti "pariwisata budaya Wae Rebo", "pariwisata berbasis komunitas", "pariwisata berkelanjutan," dan "pariwisata berbasis komunitas", penelusuran dilakukan melalui situs web resmi pemerintah dan basis data seperti Google Scholar, ResearchGate, dan DOAJ. Untuk menjamin keterbaruan dan relevansi informasi, literatur yang dipilih dibatasi pada publikasi tahun 2015–2025. Setelah itu, setiap sumber dipilih berdasarkan kredibilitas, relevansi topik, dan relevansi dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul dianalisis melalui analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan tematik, yaitu pendekatan yang berfokus pada identifikasi dan pengelompokan pola makna atau tema-tema utama dalam data, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman (1994). Untuk menjaga keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber yaitu membandingkan temuan dari jurnal akademik, laporan penelitian, dan dokumen resmi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peluang dan hambatan dalam pengembangan pariwisata budaya di Kampung Wae Rebo.

Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi dan Pariwisata Budaya Berkelanjutan di Wae Rebo

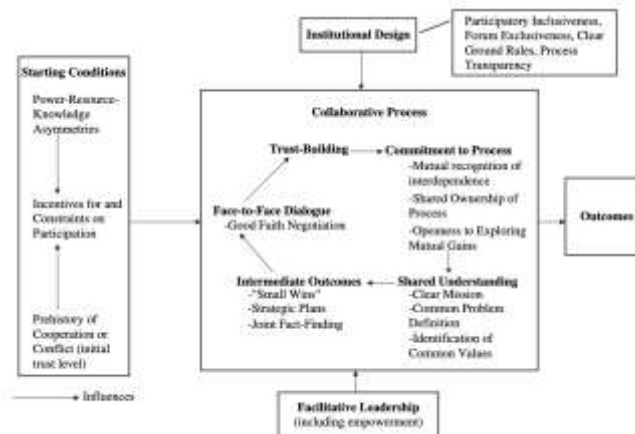
Wae Rebo merupakan sebuah kampung adat yang terletak di Desa Satar Lenda, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Hawanya terbilang cukup sejuk. Dikenal dengan sebutan “kampung di atas awan”, Wae Rebo berada pada ketinggian mencapai 1.100 meter di atas permukaan laut. Kampung yang dikukuhkan menjadi enclave ini juga dikelilingi oleh pegunungan dan hutan yang lebat, serta terpisah jauh dari pemukiman lain (Antar, 2013). Secara administratif, Wae Rebo berbatasan dengan Kecamatan Lelak di sebelah Utara, Pulau

Mules di sebelah Selatan, Kecamatan Satar Mese di sebelah Timur, dan Kabupaten Manggarai Barat di sebelah Barat. Kampung tradisional Wae Rebo merupakan satu-satunya desa yang tetap melestarikan contoh asli rumah bundar dengan atap jerami yang dikenal sebagai Mbaru Niang di seluruh wilayah Manggarai (Lanur dan Martini, 2015). Untuk mencapai kampung ini, pengunjung dari pusat Kota Ruteng memerlukan waktu sekitar 2 jam 30 menit untuk menuju Denge, dengan jarak 75 km. Setelah tiba di Denge, pengunjung perlu berjalan kaki sekitar 2 jam untuk mencapai Wae Rebo dengan jarak yang harus ditempuh sekitar 8.100 m. Keistimewaan desa ini terletak pada desain rumahnya, tata letak perkampungan atau pemukimannya, serta pola kehidupan sosial-budaya masyarakatnya.

Sebagai kampung yang masih mempertahankan arsitektur dan kehidupan lokalnya, Wae Rebo dijadikan sebagai destinasi wisata budaya yang unik dan bernilai tinggi. Sejak mendapatkan penghargaan sebagai Warisan Budaya Dunia pada Agustus 2012 oleh UNESCO *Asia-Pacific Awards for Heritage Conservation*, popularitas Wae Rebo semakin meningkat dan menarik banyak perhatian dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Tidak hanya itu, pada tahun 2018, Kampung Wae Rebo juga mendapatkan penghargaan dalam kategori budaya oleh *Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA)*, serta dinobatkan sebagai salah satu kota kecil terindah di dunia oleh majalah *Time Out* pada tahun 2024. Pengakuan tersebut memperkuat posisi Wae Rebo sebagai destinasi wisata budaya terkemuka yang banyak didatangi oleh wisatawan. Namun, hal tersebut juga membawa tantangan dalam hal keberlanjutan. Kurangnya infrastruktur seperti akses jalan, jaringan listrik, penginapan dan kamar mandi, serta jaringan komunikasi yang sulit menimbulkan hambatan bagi kenyamanan para pengunjung yang datang (Sangkak dan Ikmal, 2022). Selain itu, sebagai destinasi yang bergantung pada keindahan alam, serta warisan budaya dan tradisi lokal, Wae Rebo membutuhkan kapasitas masyarakat yang memadai dalam memahami pengelolaan pariwisata berkelanjutan, agar tidak terjadi kerusakan pada lingkungan maupun nilai-nilai budaya lokalnya. Keterlibatan masyarakat melalui edukasi dan pendampingan merupakan aspek krusial untuk

mencapai keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan pelestarian budaya setempat. Di sinilah pentingnya penerapan *collaborative governance*, di mana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, pelaku usaha, akademisi, serta *stakeholders* lainnya berjalan secara terstruktur dan berkesinambungan (Arma, 2023).

***Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata Budaya Wae Rebo**



Gambar 1. Model Collaborative Governance Ansell dan Gash

Sumber: *Collaborative Governance in Theory and Practice* Chris Ansell Alison Gash University of California, Berkeley.

Ansell dan Gash (2008) menawarkan suatu model yang menjelaskan bagaimana tata kelola kolaboratif bekerja melalui pembagian ke dalam beberapa komponen inti. Kerangka tersebut menguraikan bahwa *collaborative governance* dapat dipahami melalui empat elemen utama, yakni kondisi awal yang membentuk konteks kerja sama (*starting conditions*), peran pemimpin yang mampu memfasilitasi proses secara inklusif (*facilitative leadership*), rancangan kelembagaan atau aturan main yang mengatur interaksi para aktor (*institutional design*), serta rangkaian proses kolaborasi yang dijalankan selama kerja sama berlangsung yang akan kami kaji dalam konteks Pengembangan Pariwisata Budaya Berkelanjutan Di Kampung Wae Rebo.

Starting Conditions

Starting Conditions merujuk pada kondisi awal sebelum terbentuknya kolaborasi antar aktor dalam pengembangan pariwisata Kampung Adat Wae Rebo. Dalam kerangka *Collaborative Governance* (Ansell & Gash), kondisi awal ini meliputi *power-resource imbalance*, *incentives to participate*, dan *history of cooperation or conflict*. Ketiga aspek ini membentuk fondasi yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi pengembangan pariwisata budaya di Wae Rebo.

a. *Power-Resource Imbalance* (Ketimpangan Kekuasaan dan Sumber Daya)

Sebelum pariwisata Wae Rebo berkembang, terjadi ketimpangan sumber daya antara aktor lokal dan aktor eksternal. Masyarakat Adat Wae Rebo memiliki *modal budaya* tinggi seperti adat istiadat kuat, rumah adat Mbaru Niang, ritual Penti dan Pa'u Wae Lu'u, pola hidup agraris, dan struktur adat yang kokoh. Namun minim modal finansial, kurang akses komunikasi (tidak ada jaringan), keterbatasan pengetahuan kepariwisataan, serta akses menuju kampung yang sulit sehingga terdapat ketergantungan pada pertanian dan tenun membuat kapasitas ekonomi terbatas (Beeh, 2019). Kemudian di tahun 1998 Pemerintah Daerah Manggarai memberi bantuan renovasi lewat sumber daya anggaran dan memberikan otoritas yang dominan terutama dalam kebijakan. Keindahan Wae Rebo kemudian menarik perhatian NGO hingga lembaga internasional seperti NDECON, Burung Indonesia, UNESCO, hingga SwissContact yang memberikan pengelolaan dan pendidikan pariwisata lebih baik, NGO Yori Antar dan Yayasan Rumah Asuh memegang peran signifikan dalam revitalisasi fisik. Ketimpangan kekuasaan terjadi karena masyarakat adat kuat secara budaya, tetapi lemah secara ekonomi dan teknis; sementara pemerintah dan NGO kuat secara sumber daya dan jaringan, sehingga berpotensi mendominasi proses pengambilan keputusan.

b. *Incentives to Participate* (Motivasi Aktor untuk Terlibat)

Meskipun demikian, seluruh aktor memiliki insentif yang kuat untuk terlibat dalam proses kolaboratif. Bagi masyarakat adat, pariwisata menjadi peluang

untuk memperoleh pendapatan tambahan sekaligus memperkuat pelestarian budaya (Beeh, 2019). Pemerintah daerah berkepentingan terhadap peningkatan ekonomi lokal dan citra pariwisata daerah, sementara lembaga eksternal melihat Wae Rebo sebagai model pembangunan ekowisata berbasis masyarakat yang potensial untuk dikembangkan dan dipromosikan. Insentif ini membuat seluruh aktor bersedia terlibat dalam proses kolaborasi.

c. *Prior History of Cooperation or Conflict*

Sejarah pariwisata Wae Rebo menunjukkan adanya rekam jejak kolaborasi yang kuat dengan berbagai aktor, meskipun tetap menyimpan potensi konflik kecil. Sejak kunjungan peneliti asing pada 1984–2005 (Simon, Claus, Matsuda, Catherine Allerton) yang meningkatkan eksposur awal, hingga inisiatif pariwisata berbasis masyarakat yang dimulai Martin Anggo pada 2005–2007 dengan dukungan INDECON dan EcoSea dalam pemetaan budaya dan identifikasi sumber daya, kolaborasi terus berkembang. Pada 2007, UNESCO dan National Geographic melakukan publikasi besar-besaran, diikuti oleh bantuan rekonstruksi Mbaru Niang oleh Yori Antar & Rumah Asuh (2008–2010) serta penguatan kapasitas manajemen, pelayanan wisata, dan cinderamata melalui program INFEST Uni Eropa (2013–2016). Terbentuknya LPBW (2007–2012) semakin memperkuat kelembagaan lokal. Meski demikian, beberapa potensi konflik muncul, seperti kekhawatiran masyarakat terhadap pembangunan akses jalan yang bisa merusak kesakralan kampung, dominasi aktor eksternal akibat ketidakseimbangan pengetahuan pariwisata, risiko komersialisasi budaya, serta masuknya investor luar. Namun, masyarakat Wae Rebo relatif terbuka terhadap budaya luar dan mampu beradaptasi sambil menjaga adat. Kondisi awal pengembangan pariwisata budaya ini menunjukkan ketimpangan sumber daya antara masyarakat adat dan aktor eksternal, tetapi semua pihak memiliki insentif kuat untuk berpartisipasi. Riwat kolaborasi positif menjadi modal bagi pengembangan *Collaborative*

Governance, di mana keberhasilan sangat bergantung pada kemampuan membangun kepercayaan antar aktor, menciptakan ruang dialog yang setara, dan memastikan masyarakat adat tetap menjadi pusat pengambilan keputusan (Beeh, 2019).

Institutional Design

Desain institusional dalam tata kelola kolaboratif pengembangan pariwisata Wae Rebo dibangun berdasarkan integrasi antara norma adat dan mekanisme pengelolaan modern. Struktur adat menjadi fondasi utama, terutama peran Tetua Adat dan Mbaru Niang sebagai pusat musyawarah serta ruang legitimasi keputusan kolektif. Setiap intervensi eksternal baik dari pemerintah maupun lembaga pendamping wajib mengikuti tata cara musyawarah adat sebagai bentuk penghormatan terhadap otoritas budaya lokal (Lanur & Martini, 2015). Mekanisme partisipasi masyarakat diwujudkan melalui pertemuan kampung yang memungkinkan warga menyampaikan pandangan terkait pengelolaan wisata, pelestarian budaya, dan distribusi manfaat ekonomi. Proses ini diperkuat dengan praktik transparansi seperti penyampaian laporan penggunaan dana wisata dalam forum adat. Selain itu, pembagian peran antar-aktor berjalan melalui prinsip *shared responsibility*: pemerintah daerah berfokus pada penyediaan infrastruktur, masyarakat adat menjadi pengelola utama aktivitas wisata, sementara mitra eksternal seperti INDECON dan Yayasan Rumah Asuh berperan dalam pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas pengelolaan (Lanur & Martini, 2015; Pajarosya, 2021).

Kelembagaan ini juga dirancang dengan model pengambilan keputusan berbasis konsensus. Keputusan strategis, termasuk renovasi Mbaru Niang atau pengaturan jalur trekking, baru dapat dilaksanakan setelah melalui konsultasi antara tetua adat, kelompok kerja wisata, dan perwakilan pemerintah desa. Model ini menjaga keseimbangan antara pembangunan pariwisata dan perlindungan identitas budaya. Lebih jauh, aturan normatif seperti larangan dokumentasi tanpa izin atau

pembatasan akses ke ruang sakral telah dirumuskan bersama dan menjadi pedoman operasional bagi wisatawan (Lanur & Martini, 2015).

Dengan demikian, desain institusional pada kasus Wae Rebo memperlihatkan bagaimana integrasi antara sistem adat dan tata kelola modern mampu menciptakan mekanisme kolaboratif yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Desain ini tidak hanya mencegah dominasi aktor eksternal, tetapi juga memastikan bahwa arah pengembangan pariwisata tetap sejalan dengan nilai budaya dan struktur sosial masyarakat adat Wae Rebo.

Facilitative Leadership

Dalam konteks pengembangan pariwisata budaya di Wae Rebo, kepemimpinan fasilitatif menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Meskipun kondisi awal dan desain kelembagaan telah memberikan landasan struktural bagi terbangunnya kerja sama, kelancaran proses kolaboratif sangat bergantung pada hadirnya figur yang mampu menjaga keseimbangan relasi kekuasaan, memastikan proses deliberatif berjalan terbuka, serta mengarahkan interaksi menuju tujuan bersama (Ansell & Gash, 2007). Pada titik ini, pemimpin tidak berperan sebagai otoritas tunggal yang memerintah, tetapi sebagai pengelola dinamika proses yang mendorong setiap aktor menyuarakan kepentingannya secara setara.

Situasi Wae Rebo memperlihatkan betapa kebutuhan terhadap kepemimpinan jenis ini bersifat mendesak. Masyarakat adat menguasai legitimasi budaya dan pengetahuan turun-temurun, sementara pemerintah membawa instrumen regulasi dan kapasitas pendanaan. Aktor eksternal seperti NGO dan lembaga internasional hadir dengan pengalaman teknis, metodologi pemberdayaan, dan jaringan global. Ketimpangan sumber daya dan pengalaman yang melekat pada masing-masing pihak berpotensi menciptakan hierarki baru dalam proses kolaborasi bila tidak dikelola secara cermat (Mahadiansar et al., 2024). Karena itu, kehadiran pemimpin

fasilitatif dibutuhkan untuk menjembatani beragam kepentingan dan memastikan posisi tawar tiap aktor tidak saling meniadakan.

Manifestasi kepemimpinan fasilitatif tampak dalam kemampuan pemimpin lokal maupun pendamping eksternal untuk memediasi perbedaan perspektif antara kepentingan pelestarian budaya dengan tuntutan pembangunan pariwisata modern. Perdebatan mengenai renovasi Mbaru Niang, perbaikan jalur trekking, atau penyusunan tata tertib wisatawan menunjukkan bagaimana setiap keputusan menuntut kehati-hatian metodologis agar tidak keluar dari koridor nilai-nilai adat. Kepemimpinan fasilitatif menjaga agar setiap keputusan lahir dari proses musyawarah yang menghormati otoritas budaya masyarakat setempat (Ohorella & Fitriati, 2024).

Di luar fungsi mediasi, kepemimpinan ini juga memainkan peran sebagai penggerak pemberdayaan. Pemimpin tidak berhenti pada memastikan keterlibatan masyarakat secara formal, tetapi mendorong peningkatan kapasitas mereka melalui pelatihan, transfer pengetahuan, dan pendampingan yang terstruktur. Tujuan akhirnya adalah memastikan masyarakat bukan sekadar simbol partisipasi, tetapi menjadi subjek utama pengelolaan destinasi yang memahami logika ekonomi pariwisata, prinsip keberlanjutan, serta tata kelola destinasi secara komprehensif. Program pendampingan oleh INDECON, Yayasan Rumah Asuh, hingga inisiatif INFEST Uni Eropa menjadi bukti bahwa pemberdayaan berbasis fasilitasi mampu memperkuat kemandirian masyarakat dalam jangka panjang (Mahadiansar et al., 2024).

Kepemimpinan fasilitatif juga bertugas menjaga ritme dan kualitas komunikasi di antara para aktor. Forum musyawarah yang berlangsung rutin, mekanisme konsultasi sebelum intervensi fisik, dan pelaporan transparan mengenai dana serta aktivitas wisata merupakan praktik yang memperlihatkan bagaimana proses kolaborasi dipandu untuk tetap konsisten, setara, dan berbasis kesepahaman. Ritme dialog yang stabil seperti ini merupakan prasyarat keberhasilan kolaborasi,

sebagaimana ditegaskan oleh Ansell dan Gash (2007) dalam kerangka *collaborative governance*.

Pada akhirnya, kepemimpinan fasilitatif berfungsi sebagai perekat yang mempertahankan stabilitas kolaborasi di tengah tekanan eksternal seperti komersialisasi pariwisata dan ketimpangan sumber daya. Dalam kasus Wae Rebo, tipe kepemimpinan ini memastikan bahwa masyarakat adat tetap memegang kendali atas arah pengembangan budaya mereka sendiri, sekaligus melindungi desa adat dari pola pembangunan yang berisiko mengikis nilai-nilai kultural. Kemampuan pemimpin untuk memediasi, memberdayakan, dan mengawal proses secara konsisten menjadi salah satu penentu apakah pariwisata Wae Rebo akan berkembang secara berkelanjutan atau justru melahirkan bentuk baru eksklusi dan eksploitasi (Ohorella & Fitriati, 2024).

Collaborative Process

Pada bagian proses kolaborasi sendiri, Ansell dan Gash mengidentifikasi lima indikator penting yang saling berkaitan dan tidak dapat dipahami secara terpisah. Kelima indikator ini menunjukkan bagaimana para aktor bergerak dari tahap membangun kepercayaan hingga menciptakan hasil nyata dalam kolaborasi. Proses tersebut menjadi inti dari model tata kelola kolaboratif karena menggambarkan dinamika interaksi dan langkah-langkah yang memungkinkan kolaborasi berjalan efektif (Ansell & Gash, 2008).

- ***Face To Face (Dialog Tatap Muka)***

Proses kolaboratif dalam pengembangan pariwisata budaya di Kampung Wae Rebo sangat bergantung pada dialog langsung antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, organisasi non pemerintah, serta pelaku usaha di sektor pariwisata. Melalui dialog ini, setiap pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk berkomunikasi secara langsung mengenai kepentingan, harapan, dan tantangan yang mereka hadapi. Menurut Ansell dan Gash (2008), proses kolaboratif, salah satunya

mencakup dialog tatap muka, di mana terjadi interaksi berulang yang mampu mendorong komitmen di antara para pemangku kepentingan. Diskusi ini menciptakan ruang aman bagi diskusi yang setara dan mencegah dominasi kekuasaan, sehingga menjadi dasar bagi terbentuknya kepercayaan serta kolaborasi yang efektif.

- ***Trust Building (Membangun Kepercayaan)***

Selanjutnya, membangun rasa saling percaya adalah elemen penting dalam kolaborasi ini. Untuk mencapai tujuan bersama, membangun pola kerja sama yang kuat membutuhkan kepercayaan dan komitmen jangka panjang (Ansell et al., 2020 dalam Utami dan Madjid, 2025). Kepercayaan terbentuk melalui keterbukaan dalam pengambilan keputusan, tanggung jawab atas komitmen yang dibuat, dan penghargaan atas nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang ada di Wae Rebo. Dengan adanya kepercayaan ini, para aktor yang terlibat akan lebih terbuka untuk berbagi informasi, bekerja sama dalam pelaksanaan program, dan berkomitmen terhadap tujuan jangka panjang bersama. Di masyarakat Wae Rebo, kepercayaan juga dapat diperkuat dengan keterlibatan langsung warga dalam pengelolaan pariwisata, sehingga pelestarian budaya tetap menjadi prioritas dan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat setempat.

- ***Commitment To Process (Komitmen Terhadap Proses)***

Pada tahap komitmen terhadap proses, seluruh aktor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata budaya di Kampung Wae Rebo menyepakati untuk bekerja secara kolaboratif dan menjalankan peran masing-masing demi menjaga keberlanjutan desa adat. Komitmen ini muncul dari kesadaran bahwa pelestarian Wae Rebo tidak dapat dijalankan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan konsistensi, kehadiran, dan kontribusi setiap aktor dalam jangka panjang. Berbagai pihak lembaga pengelola, masyarakat adat, pemerintah daerah, hingga kementerian terkait yang secara konsisten terlibat

dalam rangka menjadikan Wae Rebo sebagai destinasi berkelas dunia. Komitmen ini tampak dari cara setiap aktor tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga menata langkah-langkah pembangunan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan.

Dari sisi lembaga pengelola, masyarakat adat membentuk Lembaga Pelestarian Budaya Wae Rebo (LPBW) sebagai struktur internal yang menangani budaya, kebersihan, pelayanan tamu, penerangan, hingga usaha masyarakat. Pembentukan lembaga ini menunjukkan bahwa berkomitmen mengatur proses pelestarian dan pelayanan wisata secara mandiri dan berkelanjutan (Teo & Mahyuni, 2023). LPBW bukan hanya wadah administratif, melainkan instrumen yang menjamin bahwa setiap tahap pengembangan wisata berjalan sesuai nilai adat, menjaga lingkungan, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat (Teo & Mahyuni, 2023). Sementara itu, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) secara eksplisit menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi masyarakat, menjaga keaslian budaya, dan memastikan seluruh proses pengembangan dilakukan tanpa mengorbankan identitas lokal (Satria, 2022). Dukungan BPOLBF, lembaga ini aktif menjalin kerja sama lintas sektor, meminta kementerian terkait untuk memprioritaskan pembangunan di Manggarai, dan mendorong integrasi masyarakat sebagai aktor inti dalam setiap pengambilan keputusan (Saul et al., 2022).

Komitmen terhadap proses juga tampak jelas pada Pemerintah Kabupaten Manggarai yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik kampung adat, tetapi memandang Wae Rebo sebagai kawasan wisata yang melibatkan tujuh desa lain di sekitarnya. Pemerintah daerah menyadari bahwa pengembangan pariwisata yang ideal membutuhkan tahapan panjang, seperti membangun infrastruktur, memperkuat lembaga pariwisata, dan memastikan manfaatnya dirasakan lebih luas oleh warga. Melalui RIPPARDA, pemerintah menetapkan kerangka strategis yang menuntut konsistensi dalam setiap

proses pembangunan mulai dari penataan destinasi, pemasaran, penguatan SDM, hingga tata kelola berbasis keterbukaan (Teo & Mahyuni, 2023). Dan pemerintah pusat juga menunjukkan komitmen melalui program-program konkret seperti gerakan BISA, promosi digital melalui GenPI, dan dukungan terhadap pembangunan destinasi digital (Teo & Mahyuni, 2023).. Sebelumnya, Wae Rebo belum ada optimalisasi praktik e-government di tingkat kabupaten yang tercermin dari minimnya informasi wisata pada situs resmi pemerintah. Kondisi ini kemudian ditanggapi dengan inisiatif penyusunan platform informasi baru yang lebih terbuka dan lengkap (*website*), sebuah langkah yang menunjukkan bahwa komitmen terhadap proses juga mencakup perbaikan berkelanjutan ketika ada kekurangan (Teo & Mahyuni, 2023).

Komitmen terhadap proses dalam pengembangan Wae Rebo terlihat dari konsistensi berbagai aktor dalam menjalankan tahapan-tahapan kerja secara serius, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang. Masyarakat adat menunjukkan ketekunan menjaga budaya dan mengelola pelayanan wisata, pemerintah daerah menyusun kerangka kerja strategis dan membuka ruang kolaborasi, BPOLBF serta kementerian terkait ikut memastikan proses berjalan terarah, dan pihak swasta serta pelaku pariwisata turut memperkuat aspek promosi serta pelayanan.

- ***Share Understanding (Pemahaman Bersama)***

shared understanding merujuk pada proses ketika seluruh aktor yang terlibat, masyarakat adat Wae Rebo, pemerintah daerah, pelaku pariwisata, lembaga adat, hingga organisasi pendukung membangun kesepahaman yang sama mengenai apa yang ingin dicapai, nilai apa yang harus dijaga, dan bagaimana pariwisata seharusnya dikembangkan.

Dalam pengembangan pariwisata budaya berkelanjutan di Kampung Wae Rebo, kebutuhan untuk membangun pemahaman bersama muncul karena setiap pihak melihat pariwisata dari sudut pandang yang berbeda .

Pemerintah biasanya fokus pada peningkatan jumlah wisatawan dan manfaat ekonomi, sementara masyarakat adat Wae Rebo menekankan perlindungan budaya, aturan adat, dan menjaga keseimbangan alam (Fitriyawati, 2025). Pelaku pariwisata dan organisasi pendamping mungkin melihat aspek teknis seperti manajemen wisata, promosi, atau keberlanjutan lingkungan. Perbedaan sudut pandang ini membuat penyamaan pemahaman menjadi kebutuhan mendasar sebelum masuk ke tahap perencanaan atau tindakan (Jadu, 2025).

Pemahaman bersama terbentuk melalui diskusi, musyawarah, dan pertukaran informasi yang berulang antara pemerintah, lembaga adat, komunitas, dan pihak pendamping. Dalam proses ini, semua pihak akhirnya memahami bahwa pariwisata di Wae Rebo tidak bisa diperlakukan seperti destinasi lain. Mereka menyadari bahwa Wae Rebo punya batasan alam, nilai adat, dan identitas budaya yang harus dilindungi. Rumah adat Mbaru Niang, struktur sosial, dan tata ruang kampung bukan sekadar objek wisata, tetapi warisan yang harus dijaga bersama (Teo & Mahyuni, 2023). Pemahaman semacam ini membuat semua pihak mengerti bahwa pariwisata tidak boleh mengejar keuntungan cepat yang justru bisa merusak budaya atau lingkungan.

Dalam tahap ini, para aktor juga menyamakan persepsi tentang peran masing-masing. Pemerintah dipahami sebagai pengatur arah kebijakan dan penyedia dukungan teknis. Masyarakat adat menjadi pengambil keputusan utama untuk hal-hal yang menyangkut aturan adat, tata ruang, dan aktivitas budaya. Pelaku usaha wisata berperan dalam promosi dan pengelolaan kunjungan agar tetap sesuai kapasitas desa. Ketika semua orang tahu dan mengakui peran masing-masing, proses kerja menjadi lebih tertata dan mengurangi potensi gesekan. Pemahaman bersama ini juga mencegah konflik karena semua keputusan berpijak pada prinsip yang sebelumnya sudah disepakati.

- ***Intermediate Outcomes (Hasil Antara)***

Intermediate outcomes merujuk pada berbagai hasil sementara yang muncul selama proses kolaborasi berlangsung. Hasil ini belum menggambarkan tujuan akhir, tetapi menunjukkan bahwa kerja sama antara para aktor berjalan efektif. Hasil-hasil sementara ini sangat penting karena menjadi indikator bahwa komunikasi, koordinasi, dan pembagian peran yang dibangun sudah mulai menghasilkan dampak nyata bagi aktivitas pengelolaan pariwisata. Di Wae Rebo, hasil antara ini dapat dilihat dari berkembangnya kapasitas masyarakat, terbentuknya mekanisme pengelolaan wisata, serta meningkatnya kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat.

Salah satu hasil antara yang terlihat adalah menguatnya kapasitas kelembagaan masyarakat adat dalam mengatur kunjungan wisatawan. Sebelum adanya kolaborasi, pengelolaan kunjungan ke Wae Rebo masih dilakukan secara sederhana dan tidak terlalu terstruktur (Fitriyawati, 2025). Namun melalui berbagai pendampingan dari pemerintah daerah, penggiat pariwisata, komunitas lokal, dan lembaga adat, masyarakat semakin mampu menyusun sistem pengelolaan yang lebih tertata. Misalnya, aturan kunjungan, batasan jumlah wisatawan per hari, dan tata cara penerimaan tamu dirumuskan bersama berdasarkan prinsip adat (Nadriana & Hastoro, 2023). Walaupun belum mencapai bentuk paling ideal, penguatan aturan ini merupakan capaian penting karena menjadi fondasi bagi pariwisata yang tertib dan sesuai nilai budaya.

Hasil sementara lainnya terlihat pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat terkait pelayanan wisata. Program pelatihan seperti manajemen homestay, pemanduan wisata, literasi pariwisata, hingga pengenalan konsep keberlanjutan membuat masyarakat, terutama generasi muda, semakin siap terlibat dalam aktivitas wisata (Nadriana & Hastoro, 2023). Keterampilan baru ini menciptakan peluang ekonomi tambahan bagi warga, baik sebagai pemandu jalur trekking, penjaga homestay, pengelola transportasi lokal, maupun penjual produk budaya (Teo & Mahyuni, 2023). Ini

menunjukkan bahwa proses kolaborasi tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan, tetapi juga perubahan nyata dalam kompetensi masyarakat. Selain itu, munculnya sistem pembagian pendapatan berbasis kesepakatan adat merupakan hasil antara yang penting. Mekanisme memastikan bahwa pendapatan tersebut digunakan untuk kepentingan bersama, seperti perawatan rumah adat, pelestarian ritual adat, dan kebutuhan desa. Meski belum sepenuhnya sempurna, mekanisme pembagian seperti ini menandakan bahwa kolaborasi antar aktor sudah menghasilkan sistem tata kelola ekonomi yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Saul et al., 2022).

Intermediate outcomes terlihat dalam meningkatnya rasa saling percaya di antara lembaga adat, pemerintah daerah, dan para pelaku pariwisata. Pada tahap awal, perbedaan kepentingan misalnya antara keinginan pemerintah meningkatkan kunjungan wisata dan keinginan masyarakat menjaga ketertiban adat berpotensi memicu ketegangan. Namun, melalui dialog dan kerja bersama, perlahan terbangun kesadaran bahwa tiap aktor memiliki peran yang saling melengkapi. Kepercayaan ini penting karena menjadi modal sosial bagi keberlanjutan proses kolaborasi ke depan. Hasil sementara juga tampak dari semakin dikenalnya Wae Rebo sebagai destinasi pariwisata budaya yang dikelola langsung oleh masyarakat adat. Promosi yang dilakukan pemerintah dan komunitas wisatawan, ditambah penyusunan standar layanan yang lebih baik, membuat Wae Rebo menjadi contoh desa adat yang mempraktikkan pariwisata berkelanjutan (Teo & Mahyuni, 2023). Meski hasil ini belum menggambarkan seluruh tujuan akhir, pengakuan terhadap praktik pengelolaan lokal merupakan capaian yang memperkuat posisi masyarakat dalam menentukan arah pariwisata.

Kesimpulan :

Pengalaman pengembangan pariwisata budaya di Kampung Wae Rebo menunjukkan bahwa keberlanjutan destinasi hanya dapat tercapai ketika berbagai

aktor bersedia membangun tata kelola yang menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama pengambil keputusan. Melalui pendekatan collaborative governance, hubungan antara pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat terlihat bukan sebagai proses yang berdiri sendiri, melainkan sebagai dua aspek yang harus berjalan beriringan. Ketimpangan sumber daya yang dirasakan sejak awal dapat diredam ketika hadir kepemimpinan yang mampu memfasilitasi percakapan setara, menengahi perbedaan kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan strategis berasal dari proses deliberatif yang menghargai norma adat. Perpaduan antara nilai tradisional dan mekanisme tata kelola modern akhirnya membentuk kerangka institusional yang memungkinkan pengembangan pariwisata berlangsung tanpa menggeser identitas kultural yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Wae Rebo.

Sejalan dengan berjalannya kolaborasi, sejumlah capaian sementara memperlihatkan kemajuan berarti dalam penguatan kelembagaan dan kapasitas sosial warga. Masyarakat semakin terampil mengelola arus wisatawan, sistem pengelolaan semakin terstruktur, dan pemahaman bersama mengenai batas ekologis serta kultural desa semakin kokoh. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pariwisata budaya dapat berkembang tanpa harus mengorbankan keaslian nilai adat, bahkan memperkuat posisi masyarakat sebagai penjaga sekaligus pengelola destinasi. Dengan demikian, pengalaman Wae Rebo menegaskan bahwa keberlanjutan pariwisata memerlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh aktor, keterbukaan dalam proses kolaborasi, serta penghormatan mendalam terhadap nilai budaya sebagai pedoman utama dalam setiap kebijakan dan praktik pengembangan wisata.

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Antar, Y. (2013). Pesan dari Wae Rebo. Gramedia Pustaka Utama.
- Arma, N. A. (2023). The COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN SMART VILLAGE DESA PANGANDARAN. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 10(2), 492-502. <https://doi.org/10.37606/publik.v10i2.648>
- Aulia'i, I. A., Jagad, L. S., Kumala, N. C., & Qasamah, S. I. Analisis Peran CBT terhadap Lingkungan di Desa Wisata Karangrejo. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 14(2), 80-93.
- Beeh, Y. Y. (2017). The role of community in the development of Wae Rebo as a community-based tourism destination in East Nusa Tenggara. *Journal of Business on Hospitality and Tourism*.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai. (n.d.). *Wae Rebo, the most beautiful village in the world*. <https://pariwisata.manggaraiKab.go.id/destinasi/wae-rebo-the-most-beautiful-village-in-the-world/>.
- Djeharung, K. K. (2021). TA: KAWASAN KAMPUNG BUDAYA WAE REBO DALAM KONTEKS MENINGKATKAN DAYA TARIK PARIWISATA (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Nasional Bandung).
- Elfa Aulia, F., Adi Subakti, I., Luthfi Khoirini, I., Dewi Anggraeni, L., Trisnawati, N., & Ayu Putri, P. (2024). *Meninjau Penerapan Community-Based Tourism di Desa Wisata Karangrejo, Borobudur: Stakeholder Mapping Analysis*. 14(2), 176-188.
- Elvina Eka Saputri, Siska Nurnaningati, & Tri Ayu Mukaromatul. (2024). Smart Cultural Heritage : Strategi Wujudkan Cultural Capital Desa Tulusbesar Melalui Program Mojangki (Monggo Sanjang Mriki Space) Inovasi Desa Budaya Tulusbesar. *ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat*, 2(5), 171-178. <https://doi.org/10.61132/aspirasi.v2i5.1036>
- Fitriyawati. (2025, Mei 28). Mengungkap asal usul Wae Rebo yang jarang diketahui. *IndonesiaJuara*. Diakses dari <https://indonesiajuara.asia/blog/mengungkap-asal-usul-wae-rebo/>
- Lanur, V. S. C., & Martini, E. (2015). *Pengembangan Desa Wisata Wae Rebo Berdasarkan Kearifan Lokal* *Jurnal Planesa* (Vol. 6).
- Mahadiansar, M., Fitriyari, E. T., & Karlina, T. (2024). Analysis of collaborative governance in tourism based on empowering coastal communities in Indonesia. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(6), 9295-9310.
- Jeruma, G. (2022). MENENTUKAN ARAHAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG DESA WISATA WAE REBO

KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
(Doctoral dissertation, ITN MALANG).

- Jadu, D. (2025). Tata kelola wisata Wae Rebo oleh Lembaga Pelestari Budaya Wae Rebo dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Satar Lenda Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 9(8), 34–39.
<https://sejurnal.com/pub/index.php/jimt/article/view/8887/9995>
- Ohorella, Z., & Fitriati, R. (2024). The role of facilitative leadership in collaborative governance of marine tourism policy: A study of diving tourism in Tidore City, North Maluku Islands. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(6), 9295–9310.
- Ratna. (2025). *waerebo ekowisata budaya dan semangat keberlanjutannya*.
<https://lingkungan.pasca.ugm.ac.id/2025/07/08/waerebo-ekowisata-budaya-dan-semangat-keberlanjutannya/>.
- Risang Aji, R. (2023). *Pemanfaatan Modal Budaya dalam Mendukung Pariwisata Edukasi di Desa Wisata Pentingsari The Utilization of Cultural Capital to Support Educational Tourism in Pentingsari Tourism-Village*.
<http://jurnal.uns.ac.id/jdk>.
- Sangkak, A., & Maulida Ikmal, N. (t.t.). STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA KAMPUNG WAEREBO KECAMATAN SATAR MESE BARAT KABUPATEN MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 2(2), 2022.
- Satria, G. (2022, Agustus 10). Wae Rebo didorong jadi destinasi wisata kelas dunia. Victory News. Diakses dari
<https://mabar.victorynews.id/pariwisata/pr-3394108112/wae-rebo-didorong-jadi-destinasi-wisata-kelas-dunia>.
- Saul, E., Citra, I. P. A., & Sarmita, I. M. (2022). Implementasi strategi pengelolaan desa wisata Wae Rebo di Kabupaten Manggarai pada masa new normal. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 10(1), 32-42.
- Shidqi Rabbani, S., Bachtiar, A., & Setya Wijaya, R. (2021). Optimalisasi Pengembangan Pariwisata dan Potensi Ekonomi Lokal Di Kampong Waerebo Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(9), 1753–1774. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i9.313>.
- Teo, Y. S. A., & Mahyuni, L. P. (2023). Inovasi Digital Pengembangan Desa Wisata Wae Rebo Sebagai Cerminan Good Governance Melalui E-Government. *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 7(2).
- Utami, Yuanita and Madjid, Udaya (2025) "Analysis of Collaborative Governance of The Nation's Collective Memory Archive Registration Program," *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan*: Vol. 27: No. 1, Article 4.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media. Raharjo, W. B., Cirebon, A. K., Jawa, P., Program, B., Administrasi, S., & Daerah, P. (t.t.). *COLLABORATIVE GOVERNANCE*

DALAM PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA KERATON
KACIREBONAN KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT.

- Beeh, Y. Y. (2019). *Peran masyarakat dalam pengembangan Wae Rebo sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat di Nusa Tenggara Timur*. Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional.
- Lanur, V. S. C., & Martini, E. (2015). *Pengembangan desa wisata Wae Rebo berdasarkan kearifan lokal*. **Jurnal Planesa**, 6(2), 60–70.
- Pajarosya, A. (2021). *Perancangan identitas visual Kampung Waerebo melalui logo*. Universitas Komputer Indonesia.
<http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5926>